



KESIAPSIAGAAN SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) NEGERI CILACAP DALAM MENGHADAPI BENCANA DI KABUPATEN CILACAP

Dimas Ayu Novalita [✉], Evi Widowati

Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima Juli 2018
Disetujui Agustus 2018
Dipublikasikan September 2018

Keywords:
Preparedness, Disaster,
Disability, Disaster
Preparedness School

Abstrak

Latar Belakang: Penyandang disabilitas dilaporkan sangat rentan menjadi korban bencana, baik terluka ataupun meninggal akibat bencana dengan jumlah yang signifikan. Jumlah penyandang disabilitas yang meninggal saat bencana, jumlahnya dapat mencapai 2 kali lipat dari masyarakat umum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesiapsiagaan para difabel saat terjadi bencana.

Metode: Penelitian deskriptif kuantitatif ini melibatkan Kepala Sekolah, Guru (SDLB, SMPLB, dan SMALB), dan siswa (SDLB, SMPLB, dan SMALB). Instrumen penelitian menggunakan lembar observasi, panduan wawancara, dan lembar studi dokumen.

Hasil: Penelitian ini menunjukkan dari 30 indikator terdiri dari kebijakan sekolah dengan jumlah 4 indikator; perencanaan kesiapsiagaan dengan 17 indikator; dan mobilisasi sumber daya dengan 9 indikator menghasilkan bahwa sebesar 13,33% (4 indikator) sudah diterapkan dan sebesar 86,67% (26 indikator) yang belum diterapkan.

Simpulan: Kapasitas kesiapsiagaan SLB Negeri Cilacap dalam menghadapi bencana di Kabupaten Cilacap masih kurang.

Abstract

Background: People with disability are reported to be vulnerable of being casualties, both death or injured from disasters, in a significant number. The number of disabled persons who died during disasters could be twice of the general public. It is important to know the preparedness of the diffable during disasters.

Methods: This quantitative descriptive research was involving Principals, Teachers (SDLB, SMPLB, and SMALB), and students (SDLB, SMPLB, and SMALB). The research instrument uses observation sheets, interview guides, and document study sheets.

Result: The study shows that from 30 indicators consist of school policies with 4 indicators; preparedness planning with 17 indicators; and resources mobilization with 9 indicators resulting in 13.33% (4 indicators) already applied and 86.67% (26 indicators) which have not been implemented yet.

Conclusion: The preparedness of Cilacap State SLB in dealing with disasters in Cilacap Regency was not enough.

© 2018 Universitas Negeri Semarang

ISSN 2527 - 4252

[✉] Alamat korespondensi:
Gedung F5 Lantai 2 FIK Unnes
Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229
Email :: dimasnovalita@gmail.com

PENDAHULUAN

Bencana alam berdampak menimbulkan korban jiwa yang tinggi di dunia terutama pada kelompok rentan, salah satunya penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas dilaporkan sangat rentan menjadi korban, baik terluka ataupun meninggal akibat bencana dengan jumlah yang signifikan (Probosiwi, 2013). The International Day for Disaster Reduction tahun 2013 berfokus pada kebutuhan penyandang disabilitas dan menyadari bahwa penyandang disabilitas merupakan kelompok paling berisiko selama bencana (Stough, 2015). Penyandang disabilitas rentan dalam situasi bencana akibat adanya hambatan dan kebutuhan yang dialaminya, seperti dari aspek fisik, intelektual, mental, dan sensorik. Beragamnya hambatan yang dimiliki menyebabkan penyandang disabilitas sering mengalami kesulitan untuk mengakses dan menggunakan sumber daya yang pada umumnya tersedia dalam penanggulangan bencana (Wulandari, 2017).

Berdasarkan laporan UNISDR 2013, sebuah survei PBB terhadap lebih dari 5.000 orang penyandang disabilitas dari 126 negara menemukan bahwa hanya 20% yang bisa mengevakuasi diri dengan mudah jika terjadi bahaya mendadak, sementara sisanya mengalami kesulitan.² Dari laporan Kepala UNISDR, Margareta Wahlstrom mengatakan bahwa hasil survei menunjukkan alasan utama jumlah penyandang disabilitas yang tidak proporsional yaitu menderita dan meninggal dalam bencana. Hal tersebut dikarenakan kebutuhan dan dalam proses perencanaan mereka telah diabaikan. Gempa bumi dan tsunami di Jepang yang terjadi pada pukul 14.46 Maret 2011 mengakibatkan kematian pada penyandang disabilitas 2 kali lipat dari kematian pada populasi umum (ECOSOC-UN, 2013). Selama bencana tersebut, menurut berita dari program Japan Broadcasting Corporation's Fukushima (Welfare) Network mengungkapkan bahwa angka kematian penyandang disabilitas mencapai 2,06%, sedangkan populasi umum 1,03%.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kegempaan yang tinggi di dunia, lebih dari 10 kali lipat tingkat kegempaan dibandingkan Amerika Serikat. Secara geografis Indonesia merupakan negara kepu-

luan yang terletak pada pertemuan 4 lempeng tektonik, yaitu lempeng Benua Asia, Benua Australia, lempeng Samudra Hindia dan Samudra Pasifi. Data BMKG selama tahun 2017 hingga 20 Desember 2017, telah terjadi 6.893 kali gempa, dimana gempa dengan kekuatan >5 SR sebanyak 208 kali, gempa dirasakan 573 kali dengan kekuatan 3,5-4,2 SR, dan gempa merusak sebanyak 19 kali $\geq 4,3$ SR. Artinya hampir setiap hari merasakan gempa dengan rata-rata 19 kali. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2017, Kabupaten Cilacap merupakan kabupaten yang paling banyak mengalami bencana alam di Provinsi Jawa Tengah. Menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Cilacap, potensi bencana terbesar yang terdapat di Kabupaten Cilacap adalah Gempa bumi, karena seluruh kecamatan memiliki potensi terjadi bencana gempa bumi. Setiap bulan terdapat gempa di perairan selatan Cilacap, namun skalanya kecil dengan kekuatan <3,4 SR, sehingga tidak dapat dirasakan warga (Khasanah et al, 2014).

Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Cilacap merupakan salah satu pendidikan yang khusus diselenggarakan bagi peserta didik yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental di Kabupaten Cilacap. Berdasarkan hasil studi pendahuluan sekolah telah mendapatkan pelatihan tanggap bencana gempa bumi yang dilaksanakan oleh BPBD dan BMKG Kabupaten Cilacap pada tahun 2016. Hasil wawancara dengan salah satu guru mengatakan bahwa materi mengenai bencana belum menjadi mata pelajaran khusus di Sekolah Luar Biasa (SLB) tersebut, sehingga anak-anak masih belum memahami bencana dan bagaimana kesiapsiagaannya secara jelas. Sampai saat ini masih belum diketahui tingkat kesiapsiagaan anak-anak dan sekolah dalam menghadapi bencana gempa bumi setelah diberikannya pelatihan. Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Cilacap pada tahun 2017/2018 terdiri dari 45 guru dan 323 siswa dengan tingkat pendidikan meliputi SD 204 siswa, SMP 75 siswa, dan SMA 44 siswa. Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Cilacap berada di daerah yang memiliki potensi bencana gempa bumi, karena letak sekolahnya dekat dengan pantai selatan $\pm 2,9$ Km, sehingga sangat diperlukan kesiapsiagaan anak-anak penyandang disabilitas dalam menghadapi bencana seperti gempa bumi. Sampai

saat ini belum ada korban akibat bencana gempa bumi pada siswa ataupun guru di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Cilacap, dikarenakan pada saat terjadinya bencana siswa ataupun guru tidak berada di sekolah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, setelah simulasi oleh BPBD dan BMKG Kabupaten Cilacap sampai saat ini masih belum diketahui tingkat kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana terutama bencana gempa bumi maka peneliti ingin meneliti “Kesiapsiagaan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Cilacap dalam Menghadapi Bencana di Kabupaten Cilacap”. Sehingga, tujuan dalam penelitian adalah mengetahui kapasitas kesiapsiagaan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Cilacap dalam menghadapi bencana di Kabupaten Cilacap.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Lokasi penelitian di SLB Negeri Cilacap dengan tingkatan di dalamnya meliputi SDLB, SMPLB, dan SMALB. Waktu penelitian pada tanggal 23-27 Juli 2018. Jumlah informan dalam penelitian ini berjumlah 53 orang dengan rincian 1 kepala sekolah, 3 guru sebagai penanggung jawab sosialisasi bencana dan siswa tingkat SDLB 24 siswa, SMPLB 13 siswa, dan SMALB 12 siswa.

Teknik pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan studi dokumen. Data dianalisis dengan menggunakan analisis univariat. Penyajian data dalam penelitian ini adalah mengetahui tingkat kesesuaian poin-poin dengan standar yang ada. Skala untuk tingkat kesesuaian terdiri dari sesuai, tidak sesuai dan tidak ada, lalu dikalikan 100% dan dibagikan total poin, yaitu 30 poin indikator. Sehingga akan didapatkan persentase tingkat kesesuaian pada setiap indikatornya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini digambarkan berdasarkan Kerangka Kerja Sekolah Siaga Bencana (SSB) yang disusun oleh Konsorium Pendidikan Bencana Indonesia, dan kerangka kerja tersebut telah disusun dalam mapping instrument untuk menggambarkan kapasitas SLB

Negeri Cilacap dalam menghadapi bencana di Kabupaten Cilacap. Berdasarkan Kerangka Kerja Sekolah Siaga Bencana, untuk menjadi Sekolah Siaga Bencana (SSB) terdapat 4 poin parameter penilaian yang harus dipenuhi, yaitu pengetahuan, sikap dan tindakan; kebijakan sekolah; perencanaan kesiapsiagaan; mobilisasi sumberdaya. Parameter ini digunakan untuk mengukur upaya yang dilakukan sekolah dalam membangun SSB. Parameter memberikan cara mengukur dan mengkomunikasikan dampak, atau hasil dari suatu program, sekaligus juga proses, atau metode yang digunakan. Dalam penelitian ini hanya menggunakan 3 poin parameter, hal tersebut melihat dari kemampuan anak disabilitas yang tidak sama dengan anak-anak pada umumnya, sehingga untuk poin pengetahuan, sikap dan tindakan tidak diteliti dalam penelitian ini. Ketiga parameter tersebut meliputi kebijakan sekolah; perencanaan kesiapsiagaan; mobilisasi sumber daya.

Jumlah indikator penilaian dari ketiga parameter dalam penelitian ini yaitu 30 indikator yang terdiri dari: kebijakan sekolah dengan jumlah 4 indikator; perencanaan kesiapsiagaan dengan jumlah 17 indikator; dan mobilisasi sumber daya dengan jumlah 9 indikator. Berdasarkan hasil penelitian, penelitian akan membahas bagaimana kesiapsiagaan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Cilacap dalam menghadapi bencana di Kabupaten Cilacap dengan indikator Sekolah Siaga Bencana sebagai standar penilaiannya.

Rata-rata parameter Sekolah Siaga Bencana di SLB Negeri Cilacap dijelaskan dalam Tabel 1. Pada penelitian ini parameter yang sudah sesuai di SLB Negeri Cilacap sebesar 13,33%. Hal ini berarti belum ada dari setengah poin-poin indikator yang sudah diterapkan. Rincian rata-rata parameter dalam penelitian ini meliputi kebijakan sekolah dimana hanya 1 indikator sesuai (25%) dan 3 indikator tidak sesuai (75%). Perencanaan kesiapsiagaan dimana hanya 1 indikator sesuai (5,88%) dan 16 indikator tidak sesuai (94,12%). Mobilisasi Sumber Daya dimana hanya 2 indikator sesuai (22,22%) dan 3 indikator tidak sesuai (77,78%). Dari hasil tersebut parameter yang paling rendah diterapkan adalah poin standar perencanaan kesiapsiagaan dimana hanya tercapai sebesar 5,88%. Sedangkan yang paling tinggi

Tabel 1. Rata-rata penerapan parameter sekolah siaga bencana di SLB Negeri Cilacap

No.	P o i n Parameter	T o t a l	Penerapan (%)		Keterangan
			Sesuai	T i d a k sesuai	
1	Kebijakan Sekolah	4	1 (25%)	3 (75%)	1 indikator (25%) = sesuai 3 indikator (75%) = tidak sesuai
2	Perencanaan Kesiapsiagaan	17	1 (5,88%)	16 (94,12%)	1 indikator (5,88%) = sesuai 16 indikator (94,12%) = tidak sesuai
3	M o b i l i s a s i Sumber Daya	9	2 (22,22%)	7 (77,78%)	2 indikator (22,22%) = sesuai 7 indikator (77,78%) = tidak sesuai
Rata-Rata			4 (13,33%)	26 (86,67%)	4 indikator (13,33%) = sesuai 26 indikator (86,67%) = tidak sesuai

penerapannya adalah pada poin standar kebijakan sekolah, yaitu mencapai 25%.

Parameter kebijakan sekolah memiliki 2 poin parameter meliputi kebijakan, kesepakatan dan/atau peraturan sekolah; dan informasi, pengetahuan dan pelatihan. Kebijakan, kesepakatan dan/atau peraturan sekolah memiliki 2 indikator, yaitu adanya dokumen I Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP (termasuk didalamnya visi, misi dan tujuan sekolah) yang memuat dan mendukung upaya pengurangan risiko bencana di sekolah; dan adanya dokumen kebijakan sekolah yang memuat dan/atau mengadopsi persyaratan konstruksi bangunan dan panduan retrofit yang ada atau yang berlaku. Dari kedua indikator dalam penerapannya terdapat 1 indikator sesuai (50%) dan 1 indikator tidak sesuai (50%).

Indikator yang sesuai, dalam penelitian ini terbukti dengan adanya dokumen I Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP (termasuk didalamnya visi, misi dan tujuan sekolah) yang memuat dan mendukung upaya pengurangan risiko bencana di sekolah. Misi SLB Negeri Cilacap sudah ada yang sesuai dengan Misi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di sekolah menurut Kementerian Pendidikan Indonesia. Sedangkan, indikator yang tidak sesuai, terbukti dengan tidak adanya dokumen kebijakan sekolah yang memuat dan/atau mengadopsi persyaratan konstruksi bangunan dan panduan retrofit yang ada atau yang berlaku.

Informasi, pengetahuan dan pelatihan memiliki 2 poin indikator, yaitu tersedianya

media informasi sekolah (contoh: majalah dinding, perpustakaan, buku, modul) yang memuat pengetahuan dan informasi PRB dan dapat diakses oleh warga sekolah; dan jumlah kesempatan dan keikutsertaan warga sekolah dalam pelatihan, musyawarah guru, pertemuan desa, jambore murid, dll. Dari kedua indikator (100%) dalam penerapannya tidak sesuai

Indikator pertama tidak sesuai, terbukti dengan tidak tersedianya media informasi sekolah (contoh: majalah dinding, perpustakaan, buku, modul) yang memuat pengetahuan dan informasi PRB dan dapat diakses oleh warga sekolah. Indikator kedua tidak sesuai, terbukti dengan tidak mengikuti kesempatan dan keikutsertaan warga sekolah dalam pelatihan, musyawarah guru, pertemuan desa, jambore murid, dll.

Kebijakan pada dasarnya merupakan bentuk dukungan secara formal dari pimpinan sekolah yang diterapkan dalam peraturan sekolah, serta adanya kesepakatan mengenai hal yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Kebijakan di SLB Negeri Cilacap secara keseluruhan belum sesuai dengan standar Sekolah Siaga Bencana, karena sekolah hanya memiliki salah satu dokumen yang memuat dan mendukung adanya pengurangan risiko bencana di sekolah. Dokumen tersebut adalah misi SLB Negeri Cilacap yang sesuai dengan Misi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di sekolah yaitu membangun kemitraan antar berbagai pihak untuk mendukung pelaksanaan praktik-praktik pengarusutamaan pengurangan risiko

Tabel 2. Penilaian parameter kebijakan sekolah di SLB Negeri Cilacap

No.	Variabel/Poin Parameter	T o t a l Indikator	Penerapan (%)		Keterangan
			Sesuai	T i d a k sesuai	
Kebijakan					
1	Kebijakan, kesepakatan dan/atau peraturan sekolah	2	1 (50%)	1 (50%)	1 indikator (50%) = diterapkan 1 indikator (50%) = tidak diterapkan
2	Informasi, pengetahuan dan pelatihan	2	0%	2 (100%)	2 indikator (100%) = tidak diterapkan
3					1 indikator (25%) = diterapkan
	Total	4	1(25%)	3(75%)	3 indikator (75%) = tidak diterapkan
Perencanaan Kesiapsiagaan					
1	Dokumen penilaian risiko bencana	2	0%	2 (100%)	2 indikator (100%) = tidak diterapkan
2	Rencana aksi sekolah dalam penanggulangan bencana	3	0%	3 (100%)	3 indikator (100%) = tidak diterapkan
3	Sistem Peringatan Dini	5	0%	5 (100%)	5 indikator (100%) = tidak diterapkan
4	Prosedur Tetap Kesiapsiagaan Sekolah	1	0%	1 (100%)	1 indikator (100%) = tidak diterapkan
5	Peta evakuasi sekolah	1	0%	1 (100%)	1 indikator (100%) = tidak diterapkan
6	Kesepakatan dan ketersediaan lokasi evakuasi/shelter	5	1 (20%)	4 (80%)	1 indikator (20%) = diterapkan 4 indikator (80%) = tidak diterapkan
	Total	17	1 (5,88%)	16 (94,12%)	1 indikator (5,88%) = diterapkan 16 indikator (94,12%) = tidak diterapkan
Mobilisasi Sumber Daya					
1	Bangunan Sekolah yang aman	4	1 (25%)	3 (75%)	1 indikator (25%) = diterapkan 3 indikator (75%) = tidak diterapkan
2	Jumlah dan jenis perlengkapan, surplus dan kebutuhan dasar pasca bencana	1	0%	1 (100%)	1 indikator (100%) = tidak diterapkan
3	Gugus siaga bencana sekolah	1	0%	1 (100%)	1 indikator (100%) = tidak diterapkan

4	Kerjasama diantara gugus guru atau forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran sekolah	1	0%	1 (100%)	1 indikator (100%) = tidak diterapkan
5	Kerjasama dengan pihak-pihak terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana	1	1 (100%)	0%	1 indikator (100%) = diterapkan
6	Pemantauan dan evaluasi partisipatif mengenai kesiapsiagaan dan keamanan sekolah	1	0%	1 (100%)	1 indikator (100%) = tidak diterapkan
Total		9	2 (22,22%)	7 (77,78%)	2 indikator (22,22%) = diterapkan 7 indikator (77,75%) = tidak diterapkan

bencana di sekolah dan memenuhi sarana dan prasana untuk disabilitas. Untuk dokumen kebijakan lainnya seperti dokumen kebijakan sekolah yang memuat dan/atau mengadopsi persyaratan konstruksi bangunan dan panduan retrofit yang ada atau yang berlaku; belum menyediakan media informasi sekolah seperti majalah dinding, perpustakaan, buku, modul yang memuat pengetahuan dan informasi PRB dan dapat diakses oleh warga sekolah; serta belum mengikuti lagi kesempatan dan keikutsertaan dalam pelatihan mengenai kebencanaan.

Kepala Sekolah belum memutuskan adanya kebijakan pelaksanaan Sekolah Siaga Bencana (SSB) di SLB Negeri Cilacap, sedangkan kebijakan terkait kesiapsiagaan bencana akan sangat berpengaruh karena merupakan upaya nyata dalam pelaksanaan kegiatan siaga bencana di sekolah, yang meliputi pendidikan publik, emergency planning, Sistem Peringatan Dini (SPD) bencana dan mobilisasi sumberdaya (Susanti, 2014). Menurut Stough (2015), kebijakan sekolah bermanfaat bagi penyandang disabilitas karena dapat meningkatkan perlindungan pada saat terjadi bencana. Implementasi kebijakan sekolah dapat membangun kemampuan seseorang untuk bertahan dan menyesuaikan diri pada saat situasi darurat (Taufik, 2016).

Dalam penyebaran informasi disekolah dapat dilakukan melalui pengenalan budaya selamat kepada siswa. Pengenalan budaya keselamatan dapat dilakukan dengan cara kecil yaitu dengan memberikan arahan pada saat

upacara mengenai keselamatan berjalan, menyebrang, bersepeda, berolahraga, berkendara dan dalam kondisi darurat bencana seperti kebakaran, gempa dan lain-lain (Hutasoit, 2017).

Parameter perencanaan kesiapsiagaan memiliki 6 poin parameter meliputi dokumen penilaian risiko bencana; rencana aksi sekolah dalam penanggulangan bencana; sistem peringatan dini; prosedur tetap kesiapsiagaan sekolah, peta evakuasi sekolah; dan kesepakatan dan ketersediaan lokasi evakuasi/shelter.

Dokumen penilaian risiko bencana memiliki 2 indikator, yaitu tersedianya dokumen penilaian risiko bencana yang disusun secara berkala sesuai dengan kerentanan sekolah; dan adanya dokumen penilaian kerentanan gedung sekolah yang dinilai/diperiksa secara berkala oleh pemerintah dan/atau Pemda. Kedua indikator (100%) dalam penerapannya tidak sesuai.

Indikator pertama tidak sesuai, terbukti dengan tidak tersedianya dokumen penilaian risiko bencana yang disusun secara berkala sesuai dengan kerentanan sekolah. Indikator kedua tidak sesuai, terbukti dengan tidak tersedianya dokumen penilaian kerentanan gedung sekolah yang dinilai/diperiksa secara berkala oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Rencana aksi sekolah dalam penanggulangan bencana terdiri dari 3 indikator, ketiga indikator ini sebenarnya merupakan satu kesatuan, hanya saja dalam penilainnya dipisah menurut waktunya. Indikator tersebut adalah

tersedianya dokumen rencana aksi sekolah sebelum, saat, dan sesudah terjadi bencana yang dibuat secara berkala, direview dan diperbaharui secara partisipatif dan diketahui oleh Dinas Pendidikan setempat. Indikator tersebut dalam penerapannya tidak sesuai (100%) di SLB Negeri Cilacap, terbukti dengan sekolah tidak mempunyai dokumen rencana aksi sekolah sebelum, saat, dan sesudah terjadi bencana.

Sistem Peringatan Dini terdiri dari 5 indikator, yaitu tersedianya akses terhadap informasi bahaya, baik dari tanda alam, informasi dari lingkungan, dan dari pihak berwenang (pemerintah daerah dan BMKG); adanya alat peringatan dan tanda bahaya yang disepakati dan dipahami seluruh komponen sekolah; adanya biaya pemeliharaan sistem peringatan dini yang telah diuji dan diperharui melalui kegiatan simulasi/drill; tersedianya Program Tetap (PROTAP) penyebarluasan informasi peringatan bahaya di lingkungan sekolah; adanya petugas yang bertanggungjawab dan berwenang mengoperasikan alat peringatan dini. Kelima indikator tersebut dalam penerapannya tidak sesuai (100%) di SLB Negeri Cilacap.

Indikator pertama tidak sesuai, terbukti dengan tidak tersedianya akses terhadap informasi bahaya, baik dari tanda alam, informasi dari lingkungan, dan dari pihak berwenang (pemerintah daerah dan BMKG). Indikator kedua tidak sesuai, terbukti dengan tidak tersedianya alat peringatan dan tanda bahaya yang disepakati dan dipahami seluruh komponen sekolah. Indikator ketiga tidak sesuai, terbukti dengan tidak tersedianya biaya pemeliharaan sistem peringatan dini yang telah diuji dan diperharui melalui kegiatan simulasi/drill. Indikator keempat tidak sesuai, terbukti dengan tidak tersedianya Program Tetap (PROTAP) penyebarluasan informasi peringatan bahaya di lingkungan sekolah. Indikator kelima tidak sesuai, terbukti dengan tidak tersedianya petugas yang bertanggungjawab dan berwenang mengoperasikan alat peringatan dini. Prosedur Tetap Kesiapsiagaan terdiri dari 1 indikator, yaitu adanya prosedur tetap kesiapsiagaan sekolah yang disepakati dan dilaksanakan oleh seluruh komponen sekolah dan direview secara rutin serta dimutakhirkan secara partisipatif. Indikator tersebut dalam penerapannya tidak sesuai, terbukti dengan SLB Negeri Cilacap.

Peta evakuasi sekolah hanya memiliki 1 indikator yaitu sekolah memiliki peta evakuasi dengan tanda dan rambu yang terpasang yang mudah dipahami oleh seluruh komponen sekolah dan dapat ditemukan dengan mudah di lingkungan sekolah. Indikator tersebut dalam penerapannya tidak sesuai di SLB Negeri Cilacap.

Kesepakatan dan Ketersediaan Lokasi Evakuasi/Shelter memiliki 5 indikator, yaitu sekolah memiliki lokasi evakuasi/shelter terdekat yang tersosialisasikan serta disepakati oleh seluruh komponen sekolah, orangtua murid, masyarakat sekitar dan pemerintah daerah; adanya prosedur tetap kesiapsiagaan sekolah dalam penggandaan dan penyimpanan dokumen penting sekolah pada tempat yang aman; tersedianya pencatatan nomer telepon penting yang mudah diakses seluruh komponen sekolah (Puskesmas/rumah sakit terdekat, pemadam kebakaran, dan aparat terkait); adanya peta evakuasi sekolah dengan tanda dan rambu yang terpasang, yang mudah dipahami oleh seluruh komponen sekolah; dan adanya lokasi evakuasi/shelter terdekat dengan sekolah yang disepakati dan disosialisasikan kepada seluruh komponen sekolah sebagai tempat evakuasi saat terjadi bencana. Dari kelima indikator dalam penerapannya terdapat 1 indikator sesuai (20%) dan 4 indikator tidak sesuai (80%).

Indikator pertama sesuai, terbukti dengan sekolah memiliki lokasi evakuasi/shelter terdekat yang tersosialisasikan serta disepakati oleh seluruh komponen sekolah, orangtua murid, masyarakat sekitar dan pemerintah daerah. Indikator kedua tidak sesuai, terbukti dengan tidak adanya prosedur tetap kesiapsiagaan sekolah dalam penggandaan dan penyimpanan dokumen penting sekolah pada tempat yang aman. Indikator ketiga tidak sesuai, terbukti dengan tidak tersedia pencatatan nomer telepon penting yang mudah diakses seluruh komponen sekolah (Puskesmas/rumah sakit terdekat, pemadam kebakaran, dan aparat terkait). Indikator keempat tidak sesuai, terbukti dengan tidak adanya peta evakuasi sekolah dengan tanda dan rambu yang terpasang, yang mudah dipahami oleh seluruh komponen sekolah.

Indikator kelima tidak sesuai, terbukti dengan tidak adanya lokasi evakuasi/shelter terdekat dengan sekolah yang disepakati dan

disosialisasikan kepada seluruh komponen sekolah sebagai tempat evakuasi saat terjadi bencana.

Penerapan kesiapsiagaan di SLB Negeri Cilacap juga masih belum sesuai, karena hanya 1 indikator dari 17 indikator yang sesuai, yaitu sekolah sudah memiliki lokasi evakuasi/shelter yang berada di halaman utama sekolah dan sudah tersosialisasikan serta disepakati oleh seluruh komponen sekolah, orangtua murid, masyarakat sekitar dan pemerintah daerah. Untuk indikator lainnya SLB Negeri Cilacap belum sesuai, indikator tersebut meliputi: 1) Tersedianya dokumen penilaian risiko bencana yang disusun secara berkala sesuai dengan kerentanan sekolah; 2) Tersedianya dokumen penilaian kerentanan gedung sekolah yang dinilai/diperiksa secara berkala oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; 3) Adanya dokumen rencana aksi sekolah sebelum, saat, dan sesudah terjadi bencana; 4) Tersedianya akses terhadap informasi bahaya, baik dari tanda alam, informasi dari lingkungan, dan dari pihak berwenang (pemerintah daerah dan BMKG); 5) Tersedianya alat peringatan dan tanda bahaya yang disepakati dan dipahami seluruh komponen sekolah; 6) Tersedianya biaya pemeliharaan sistem peringatan dini yang telah diuji dan diperharui melalui kegiatan simulasi/drill; 7) Tersedianya Program Tetap (PROTAP) penyebarluasan informasi peringatan bahaya di lingkungan sekolah; 8) Tersedianya petugas yang bertanggungjawab dan berwenang mengoperasikan alat peringatan dini; 9) Tersedianya prosedur tetap kesiapsiagaan sekolah yang disepakati dan dilaksanakan oleh seluruh komponen sekolah dan direview secara rutin serta dimutakhirkan secara partisipatif; 10) Adanya peta evakuasi dengan tanda dan rambu yang terpasang yang mudah dipahami oleh seluruh komponen sekolah dan dapat ditemukan dengan mudah di lingkungan sekolah; 11) Adanya prosedur tetap kesiapsiagaan sekolah dalam penggandaan dan penyimpanan dokumen penting sekolah pada tempat yang aman; 12) Tersedia pencatatan nomer telepon penting yang mudah diakses seluruh komponen sekolah (Puskesmas/rumah sakit terdekat, pemadam kebakaran, dan aparat terkait); 13) Adanya peta evakuasi sekolah dengan tanda dan rambu yang terpasang, yang mudah dipa-

hami oleh seluruh komponen sekolah; dan 14) Adanya lokasi evakuasi/shelter terdekat dengan sekolah yang disepakati dan disosialisasikan kepada seluruh komponen sekolah sebagai tempat evakuasi saat terjadi bencana.

Dari 14 indikator penilaian penerapan program Sekolah Siaga Bencana yang belum diterapkan oleh SLB Negeri Cilacap ini karena: 1) Kurangnya pemahaman/pengetahuan dari sekolah dalam penilaian risiko; 2) Kurangnya pemahaman/pengetahuan dari sekolah dalam melaksanakan prosedur kesiapsiagaan bencana di sekolah; 3) Kurangnya peran aktif dari tenaga pendidik dalam kegiatan Pengurangan Risiko Bencana di sekolah; 4) Kendala yang berasal dari luar sekolah yaitu kerjasama dengan dinas terkait. Kurangnya respon dari pihak pemerintah dalam menanggapi permasalahan program Sekolah Siaga Bencana di SLB; 5) Kurangnya pemahaman/pengetahuan dari sekolah dalam pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah yang sesuai dengan peraturan atau standar untuk Sekolah Siaga Bencana.

Perlunya mengadakan program kesiapsiagaan dan evaluasinya terkait pengurangan risiko bencana disekolah baik pada saat pelaksanaan maupun setelah program selesai. Sehingga dapat mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dilapangan yang nantinya menjadi bahan untuk perbaikan program dalam pencapaian yang sudah disepakati. Menurut Cindrawaty Lesmana (2015), menyatakan bahwa perencanaan kesiapsiagaan merupakan tahapan menyiapkan tindakan yang efektif dan efisien sebelum terjadi bencana khususnya di sekolah.

Parameter Mobilisasi Sumber Daya memiliki 6 parameter, meliputi bangunan sekolah yang aman umlah dan jenis perlengkapan, surplus dan kebutuhan dasar pasca bencana; gugus siaga bencana sekolah; kerjasama diantara gugus guru atau forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran sekolah; kerjasama dengan pihak-pihak terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan pemantauan dan evaluasi partisipatif mengenai kesiapsiagaan dan keamanan sekolah.

Bangunan sekolah yang aman memiliki 4 indikator, meliputi struktur bangunan sekolah sesuai dengan standar bangunan aman bencana; tata letak dan desain bangunan utama

terpisah dari bangunan UKS; tata letak dan desain kelas yang aman; serta desain dan tata letak yang aman untuk penempatan sarana dan prasarana kelas dan sekolah. Keempat indikator tersebut dalam penerapannya 1 indikator sesuai (25%) dan 3 indikator tidak sesuai (75%).

Indikator pertama tidak sesuai, terbukti dengan struktur bangunan di SLB Negeri Cilacap belum sesuai dengan standar bangunan aman bencana, karena belum pernah dianalisis apakah gedung sudah memenuhi untuk keselamatannya. Indikator kedua sesuai, karena tata letak dan desain bangunan utama sudah terpisah dengan bangunan UKS. Indikator ketiga tidak sesuai, terbukti dengan tata letak dan desain kelas yang belum aman untuk disabilitas. Indikator keempat tidak sesuai, terbukti dengan desain dan tata letak untuk penempatan sarana dan prasarana kelas dan sekolah belum aman.

Surplai dan kebutuhan dasar pasca bencana dalam penerapannya tidak sesuai, terbukti dengan SLB Negeri Cilacap belum menyediakan perlengkapan dasar dan suplai kebutuhan dasar pasca bencana yang dapat segera dipenuhi dan diakses oleh warga sekolah.

Gugus siaga bencana sekolah dalam penerapannya tidak sesuai, terbukti dengan SLB Negeri Cilacap belum melibatkan siswa dalam gugus siaga bencana karena dari pihak guru menyatakan bahwa siswa masih harus diawasi, sehingga pembentukan gugus mengenai siaga bencana belum dilaksanakan.

Kerjasama diantara gugus guru atau forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran sekolah dalam penerapannya tidak sesuai, terbukti dengan SLB Negeri Cilacap belum mengadakan musyawarah yang khusus untuk PRB di sekolah.

Kerjasama dengan pihak-pihak terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam penerapannya sesuai, terbukti dengan SLB Negeri Cilacap sudah bekerjasama dengan pihak-pihak terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu BPBD, BMKG, Polres, Puskesmas, dll dalam persiapannya menghadapi bencana atau keadaan darurat.

Pemantauan dan evaluasi partisipatif mengenai kesiapsiagaan dan keamanan sekolah dalam penerapannya tidak sesuai, terbukti dengan SLB Negeri Cilacap belum melaksanakan pemantauan dan evaluasi mengenai kesiapsia-

gaan dan keamanan sekolah.

Penting untuk sekolah menyiapkan mobilisasi sumber daya, baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta financial/pembiayaan dalam pengelolaan untuk menjamin kesiapsiagaan bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi di sekolah. Penerapan mobilisasi sumber daya di SLB Negeri Cilacap juga masih belum sesuai, karena dari 9 indikator hanya 2 yang sesuai, yaitu SLB Negeri Cilacap sudah menerapkan poin dimana ruang UKS harus terpisah dengan bangunan utama, dan untuk kerjasama yang dilakukan SLB Negeri Cilacap sebagai langkah pembangunan kemitraan dan jaringan sebagai upaya memperkuat kerjasama dan menyebarkan informasi mengenai berbagai kegiatan pengurangan risiko bencana, baik yang dilaksanakan oleh sekolah secara mandiri maupun atas bantuan teknis dari kelembagaan seperti BPBD dan Dinas Sosial Kabupaten Cilacap.

Sementara SLB Negeri Cilacap terdapat 7 indikator yang belum diterapkan, indikator tersebut meliputi: 1) Struktur bangunan sekolah sesuai dengan standar bangunan aman bencana; 2) Adanya frekwensi dan jenis kegiatan kerjasama diantara gugus guru atau forum MGMP sekolah terkait upaya PRB di sekolah; 3) Sekolah memiliki mekanisme pemantauan dan evaluasi partisipatif mengenai kesiapsiagaan dan keamanan sekolah secara rutin; 4) Tata letak dan desain kelas yang aman; 5) Desain dan tata letak yang aman untuk penempatan sarana dan prasarana kelas dan sekolah; 6) Adanya perlengkapan dasar dan suplai kebutuhan dasar pasca bencana yang dapat segera dipenuhi dan diakses oleh warga sekolah, seperti: alat P3K dan evakuasi, terpal, tenda dan sumber air bersih; 7) Adanya jumlah peserta didik yang terlibat dalam gugus siaga bencana yang melibatkan perwakilan peserta didik.

Adapun kendala dari 7 poin indikator penilaian penerapan program Sekolah Siaga Bencana yang belum diterapkan oleh SLB Negeri Cilacap meliputi: 1) Untuk indikator sarana prasarana pendukung program sekolah siaga bencana seperti bangunan sekolah, kualitas bangunan dan desain bangunan sekolah, SLB Negeri Cilacap belum bisa melakukan renovasi bangunan sekolah yang sesuai dengan standar dan menjadikan sekolah yang bangunannya

aman dari bencana seperti gempa, karena hal ini membutuhkan biaya yang besar dan membutuhkan waktu yang cukup lama; 2) Kurangnya kerjasama antar sekolah dalam menjalankan program sekolah siaga bencana sekolah terkait upaya PRB di sekolah; dan 3) Sekolah belum memahami pentingnya pelaksanaan program kesiapsiagaan di sekolah.

Sebagai salah satu sekolah yang sudah mendapatkan pelatihan mengenai kesiapsiagaan bencana untuk suatu strategi pengurangan risiko bencana di sekolah, SLB Negeri Cilacap merupakan sekolah percontohan sebagai sekolah yang siap siaga dalam menghadapi bencana alam. Hal ini berkaitan dengan nilai-nilai yang akan menjadi pedoman baik-buruknya praktik pendidikan kebencanaan dalam pengurangan risiko bencana. Sedangkan prinsip-prinsip menjadi petunjuk bagaimana praktik pendidikan dalam pengurangan resiko bencana (PRB) harus dilaksanakan. Secara umum, mobilisasi sumber daya perlu ditingkatkan. Sekolah harus memiliki kesiapan dan kesiagaan terhadap bencana, bukan hanya mengandalkan instruksi dan bantuan dari pihak luar (Lesmana, 2015). Menurut Indriasari (2014) pentingnya mobilisasi sumberdaya untuk mencapai kestabilan kesiapsiagaan pada waktu sebelum terjadi bencana.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Penilaian penerapan program Sekolah Siaga Bencana berjumlah 30 indikator yang terdiri dari: kebijakan sekolah dengan jumlah 4 indikator; perencanaan kesiapsiagaan ada 17 indikator; dan mobilisasi sumber daya ada 9 indikator; 2) Pelaksanaan penerapan program Sekolah Siaga Bencana di SLB Negeri Cilacap dari 30 indikator yang sudah diterapkan sebesar 13,33% (4 indikator) dan yang belum diterapkan sebesar 86,67% (26 indikator); 3) Pelaksanaan penerapan program Sekolah Siaga Bencana di SLB Negeri Cilacap berdasarkan setiap parameter meliputi kebijakan sekolah rata-rata sudah diterapkan sebesar 25% (1 indikator) dan belum diterapkan sebesar 75% (3 indikator); perencanaan kesiapsiagaan rata-rata sudah diterapkan sebesar 5,88% (1 indikator) dan belum diterapkan sebesar 94,12%

(16 indikator); serta mobilisasi sumber daya rata-rata sudah diterapkan sebesar 22,22% (2 indikator) dan belum diterapkan sebesar 77,78% (7 indikator); 4) Dari hasil tersebut, tingkat kesiapsiagaan SLB Negeri Cilacap dalam menghadapi bencana di Kabupaten Cilacap masih kurang; 5) Faktor internal yang menghambat dalam pelaksanaan penerapan SSB antara lain: Kepala Sekolah belum memutuskan adanya kebijakan pelaksanaan Sekolah Siaga Bencana (SSB), keterbatasan jumlah dan pengetahuan tenaga kependidikan berkaitan dengan kegiatan SSB, serta keterbatasan siswa dalam mengakses sumber informasi bencana di sekolah; dan 6) Faktor eksternal yang menghambat dalam pelaksanaan penerapan SSB antara lain: minimnya dukungan pendanaan operasional SSB dari pemerintah, dan pelaksanaan SSB yang belum menyertakan kegiatan pendampingan berkelanjutan dari kelembagaan.

Saran untuk sekolah, meliputi: 1) Sekolah perlu konsisten dalam menerapkan kebijakan program Sekolah Siaga Bencana, mengevaluasi dan memonitoring saat diadakan pelatihan serta pembinaan kesiapsiagaan yang serius terhadap seluruh warga sekolah, yaitu kepala sekolah, guru, dan siswa; 2) Sekolah perlu mengadakan sosialisasi dan pelatihan/drilling khusus untuk para tenaga pendidikan supaya lebih mengetahui serta dapat berperan aktif dalam proram Sekolah Siaga Bencana setiap tahunnya, serta melakukan evaluasi, dan memastikan semua sesuai dengan rencana; 3) Memberikan kesempatan untuk para siswa dalam mengakses sumber informasi kebencanaan di sekolah dengan menyesuaikan kelas disabilitasnya, seperti pengelolaan majalah dinding dan pemasangan poster-poster kebencanaan dengan braille agar tunanetra dapat mengetahui informasi mengenai kebencanaan, serta pemutaran film terkait pengetahuan bencana alam; 4) Memberikan sarana dan prasarana tambahan yang lebih ramah untuk disabilitas meliputi: jalur evakuasi untuk tunanetra dan tunadaksa seperti guiding block, RAMP dan portal S; peta evakuasi dan SOP Tanggap Darurat.

Saran untuk Instansi Terkait, meliputi: 1) BPBD dan Dinas Sosial kabupaten perlu adanya pendampingan kesiapsiagaan bencana di sekolah setelah diberikan pelatihan. Pendampingan bisa dilakukan dengan membuat

perancangan untuk meningkatkan kesiapsiagaan di sekolah dengan pelaksanaan pelatihan secara rutin; 2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diharapkan secara bijak mampu mengintegrasikan materi kebencanaan dalam mata pelajaran atau menjadikan pendidikan kebencanaan sebagai muatan lokal tersendiri atau masuk ke dalam mata pelajaran Orientasi Mobilitas dan perlu mengalokasikan anggaran untuk mendukung kesiapsiagaan terhadap situasi darurat pada para siswa yang membutuhkan khusus pada sekolah tersebut secara berkelanjutan.

Saran untuk peneliti selanjutnya, yaitu peneliti selanjutnya dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk meningkatkan kesiapsiagaan di SLB dengan penilaian Sekolah Siaga Bencana. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menyusun program-program terkait dengan indikator Sekolah Siaga Bencana yang masih rendah dalam penerapannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Taufik, A. (2016). Implementasi Kebijakan Sekolah Siaga Bencana dalam Membangun Resiliensi Sekolah di SMP N 2 Cangkringan Kabupaten Sleman. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 4(1), 408–418.
- Lesmana, C. (2015). Kesiapsiagaan Komunitas Sekolah dalam Menghadapi Bencana di Kabupaten Magelang. *Jurnal Teknik Sipil*, 11(1), 1–75.
- Indriasari, F. N. (2014). Kesiapsiagaan Komunitas Sekolah Dasar Inklusi dalam Menghadapi Bencana Gempa Bumi di Yogyakarta. *Jurnal Keperawatan Notokusumo*, 5(1), 7–13.
- Hutasoit, F. ., & Widowati, E. (2017). Gambaran Penerapan Safety Education (Pendidikan Keselamatan) di Sekolah Dasar. *Journal of Health Education*, 2(1), 66–72.
- Khasanah, L. U., Suwarsito, & Sarjanti, E. (2014). Tingkat Kerawanan Bencana Tsunami Kawasan Pantai Selatan Kabupaten Cilacap. *Indonesian Journal of Geography Education*, 3(2), 77–82.
- Stough, L. M. (2015). World Report on Disability Intellectual Disabilities, and Disaste Preparedness: Cost Rica as a Case Example. *Journal of Policy and Practice in Intellectual Disability*, 12(2), 138–146.
- Probosiwi. (2013). Keterlibatan Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana (Persons with Disabilities Involvement on Disaster Prevention). *Jurnal Penanggulangan Bencana*, 4(2), 13–22.
- Stough, L. M., & Kang. (2015). The Sendai Framework for Disaster Risk Reduction and Persons with Disabilities. *International Journal of Disaster Risk Science*, 6(2), 140–149.
- Susanti. (2014). Hubungan Kebijakan, Sarana dan Prasarana dengan Kesiapsiagaan Komunitas Sekolah Siaga Bencana Banda Aceh. *Jurnal Ilmu Kebencanaan*, 1(1), 42–29.
- Wulandari. (2017). Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Penyandang Disabilitas Menghadapi Bencana Gempa Bumi. *Jurnal Prodi Manajemen Bencana*, 3(1), 23–41.
- ECOSOC. (2013). Panel Discussion on Disaster Resilience and Disability: Ensuring Equality and Inclusion. New York.